LAPORAN PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) PPID PELAKSANA FAKULTAS SENI KEAGAMAAN KRISTEN (FSKK) INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TAHUN 2025

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI

KUPANG

2025

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID Pelaksana merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan PPID Pelaksana terhadap standar layanan informasi publik, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Tahun 2025, secara umum PPID Pelaksana Fakultas Seni Keagamaan Kristen (FSKK) IAKN Kupang telah melaksanakan sebagian besar tugas pengelolaan informasi publik. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum dapat diselesaikan secara optimal sehingga memerlukan tindak lanjut pada periode berikutnya.

B. Tujuan

1. Menilai pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pelaksana Fakultas Seni Keagamaan Kristen (FSKK)
2. Mengidentifikasi indikator yang belum terpenuhi.
3. Menyusun rekomendasi perbaikan.
4. Menjadi dasar penyusunan program peningkatan kinerja PPID Tahun 2026.

C. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil penilaian, diperoleh beberapa indikator yang belum terselesaikan sebagai berikut.

1. Pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP)

Hasil Penilaian

Daftar Informasi Publik belum diperbarui secara berkala sesuai perkembangan informasi dan dokumen terbaru di lingkungan Fakultas Seni Keagamaan Kristen (FSKK).

Alasan

- Inventarisasi informasi dari setiap unit belum dilakukan secara menyeluruh.
- Belum terdapat mekanisme pembaruan data secara berkala.

Rekomendasi

- Melakukan pembaruan Daftar Informasi Publik minimal satu kali setiap tahun.

- Menetapkan penanggung jawab pengelolaan data pada setiap unit kerja.

2. Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)

Hasil Penilaian

Dokumen Daftar Informasi yang Dikecualikan belum disusun secara lengkap dan belum melalui uji konsekuensi.

Alasan

- Belum dibentuk Tim Uji Konsekuensi.
- Masih terbatasnya pemahaman mengenai klasifikasi informasi yang dikecualikan.

Rekomendasi

- Membentuk Tim Uji Konsekuensi.
- Menyusun dan menetapkan DIK sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Hasil Penilaian

SOP pelayanan informasi masih memerlukan penyempurnaan agar mencakup seluruh jenis layanan informasi publik.

Alasan

- SOP yang digunakan belum diperbarui.
- Adanya perubahan kebijakan dan mekanisme pelayanan.

Rekomendasi

- Melakukan revisi dan penyesuaian SOP.
- Mensosialisasikan SOP kepada seluruh petugas.

4. Website PPID

Hasil Penilaian

Website PPID belum memuat seluruh informasi wajib diumumkan dan informasi yang tersedia setiap saat.

Alasan

- Belum semua dokumen diunggah.
- Pengelolaan website belum dilakukan secara rutin.

Rekomendasi

- Menugaskan administrator website secara khusus.
- Melakukan pembaruan informasi secara berkala.

5. Dokumentasi dan Arsip Digital

Hasil Penilaian

Dokumentasi kegiatan dan arsip pelayanan informasi belum tersusun secara sistematis dalam bentuk digital.

Alasan

- Sistem pengarsipan masih dilakukan secara manual.
- Belum tersedia media penyimpanan digital yang terintegrasi.

Rekomendasi

- Membangun sistem arsip digital.
- Menata dokumen berdasarkan klasifikasi informasi.

6. Laporan Layanan Informasi Publik

Hasil Penilaian

Laporan layanan informasi publik belum disusun secara lengkap sesuai format yang dipersyaratkan.

Alasan

- Data pelayanan belum terdokumentasi secara berkala.
- Belum tersedia format pelaporan yang baku.

Rekomendasi

- Menyusun format laporan standar.
- Melakukan rekapitulasi pelayanan setiap bulan.

7. Penguatan Kapasitas SDM PPID

Hasil Penilaian

Petugas PPID belum seluruhnya memperoleh pelatihan mengenai pelayanan informasi publik.

Alasan

- Keterbatasan anggaran.
- Belum tersedianya program pelatihan yang berkelanjutan.

Rekomendasi

- Mengikutsertakan petugas dalam bimbingan teknis dan pelatihan PPID.
- Melaksanakan pelatihan internal secara berkala.

8. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi

Hasil Penilaian

Sarana pendukung pelayanan informasi masih perlu ditingkatkan untuk menunjang pelayanan yang lebih efektif.

Alasan

- Keterbatasan fasilitas pendukung.
- Prioritas anggaran masih difokuskan pada kebutuhan lain.

Rekomendasi

- Mengalokasikan anggaran khusus bagi pengembangan layanan PPID.
- Melengkapi fasilitas pelayanan informasi sesuai kebutuhan.

D. Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang menyebabkan indikator belum terselesaikan antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang menangani tugas PPID.
2. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan layanan informasi publik.
3. Belum optimalnya koordinasi antarunit kerja dalam penyediaan data dan dokumen.
4. Perubahan struktur organisasi dan penyesuaian pembagian tugas.
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dokumen dan pelayanan informasi.

E. Rekomendasi Umum

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Tahun 2025, direkomendasikan agar PPID Fakultas Seni Keagamaan Kristen (FSKK) IAKN Kupang:

1. Memperbarui seluruh dokumen PPID sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) secara berkala.
3. Menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi.
4. Mengoptimalkan pengelolaan website PPID sebagai media utama penyebarluasan informasi publik.
5. Meningkatkan kompetensi petugas melalui pendidikan dan pelatihan.
6. Mengembangkan sistem dokumentasi dan arsip digital.
7. Memperkuat koordinasi dengan PPID Utama dan seluruh unit kerja dalam penyediaan informasi publik.

8. Menyediakan dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

F. Penutup

Hasil Monitoring dan Evaluasi Tahun 2025 menunjukkan bahwa PPID Pelaksana Fakultas Seni Keagamaan Kristen (FSKK) IAKN Kupang telah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan informasi publik, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, koordinasi antarunit kerja, serta belum optimalnya pengelolaan dokumen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rekomendasi yang disusun dalam laporan ini diharapkan menjadi dasar bagi PPID Pelaksana untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui penyempurnaan dokumen, peningkatan kapasitas petugas, penguatan koordinasi, serta optimalisasi layanan informasi publik. Dengan pelaksanaan tindak lanjut tersebut, diharapkan kinerja PPID Pelaksana Fakultas Seni Keagamaan Kristen (FSKK) IAKN Kupang pada tahun berikutnya semakin meningkat dan mampu memenuhi standar keterbukaan informasi publik secara transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan yang berkualitas.

Ketua PPID

MTLCAkh

Merling T.L.L.C. Messakh, M.Pd